



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : BUMN/BUMD  
**LEMBAGA** : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)  
**UNIT KERJA** : PLN KANTOR PUSAT

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : I NYOMAN NGURAH WIDIYATNYA
2. Jabatan : EXECUTIVE VICE PRESIDENT MANAJEMEN PORTOFOLIO
3. NHK : 215682

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.745.780.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/46 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 129 m2/90 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 198 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.440.780.000
4. Bangunan Seluas 36 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 590.000.000
5. Tanah Seluas 8000 m2 di KAB / KOTA BULELENG, WARISAN Rp. 180.000.000
6. Tanah Seluas 4000 m2 di KAB / KOTA BULELENG, WARISAN Rp. 100.000.000
7. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA BULELENG, WARISAN Rp. 150.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 317 m2/150 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 950.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 905.000.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000



3. MOBIL, HONDA CRV TURBO 1,5 L PRESTIGE Tahun 2019,  
HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. MOBIL, HONDA CRV PRESTIGE 1.5 L Tahun 2022, HASIL  
SENDIRI Rp. 500.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 190.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.879.700.255

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 6.720.480.255

III. HUTANG Rp. 275.366.667

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 6.445.113.588

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.